

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut *Accounting Principles Board* (1970) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternative arah tindakan.” Dan Menurut *American Accounting Association* (1966) “Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak –pihak yang memerlukan .”

Menurut Halim dan Kusufi (2013) akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang akuntansi, dan tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan

masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah juga terdapat dalam Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi :

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Pasal 70: ayat 1).

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pasal 23 ayat 1).

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis meliputi prosedur-prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran sampai dengan

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun aplikasi komputer.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi :

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry. Menggunakan cash basic selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan di dapat laporan keuangan. laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukanny. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan, Investor, Kreditor, dan donator, Analisis Ekonomi dan Pemerhati

Pemerintah Daerah Lain, dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern yang lemah dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang kurang handal dan kurang relevan untuk dijadikan acuan dalam membuat keputusan (Ruslinda dkk, 2019). Laporan keuangan pemerintah ini nantinya akan digunakan untuk perbandingan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan serta menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang diajukan untuk menyediakan informasi bagi pihak luar entitas pembuatan laporan keuangan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Akuntansi keuangan daerah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern. Akuntansi keuangan daerah mempunyai beberapa tujuan meliputi tujuan pertanggungjawaban yang berarti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab

dan berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan daerah harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

Lebih lanjut, selain tujuan manajerial didalam akuntansi keuangan daerah bahwa pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan tujuan akhir dari akuntansi keuangan daerah adalah pengawasan yang memiliki arti bahwa tujuan tersebut memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya karena sistem akuntansi keuangan daerah yang lemah maka akan menyebabkan pengendalian intern lemah dan akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Kegunaan dari akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang tertuang di dalam laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

yang merupakan perwujudan dari transparansi dan berguna untuk kepentingan pihak eksternal dalam rangka pengambilan keputusan.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik serta dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya Kayati (2016) menyatakan bahwa implementasi sistem akuntansi di daerah dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri
2. Untuk kebutuhan pemerintah lebih tinggi
3. Untuk kepentingan masyarakat umum.

2.1.3 Faktor Keprilakuan

Menurut Lubis (2014) menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi. Tujuan organisasi merupakan hasil terukur yang harus dicapai. Tujuan tersebut menggambarkan hasil yang harus dicapai dalam jangka pendek guna mewujudkan visi jangka panjang.

Organisasi yang terdiri dari berbagai elemen yang sangat dinamis, terutama karyawannya. Bagaimana karyawan berpikir, merasakan dan memiliki emosi, serta bertindak berperilaku sangat menentukan keberhasilan organisasi. Ilmu perilaku organisasi

memfasilitasi manajer, pemimpin, dan karyawan untuk memahami fenomena-fenomena di organisasi. Dengan pemahaman atas pemikiran, emosi serta tindakan karyawan, pengguna ilmu perilaku organisasi dapat memprediksi, memperkirakan apa yang akan terjadi bila sesuatu dilakukan.

Pemahaman atas konsep-konsep perilaku organisasi membantu setiap karyawan di organisasi menyelesaikan organisasinya. Suwigyo (2019) mengemukakan faktor organisasi dalam kegunaan sistem ada tiga aspek, meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan.

2.1.3.1 Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem. Karena individu dalam suatu kejelasan tujuan, akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki (Sari, 2017).

Menurut Ningsih (2014) menyatakan bahwa tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang cukup atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu. Disamping itu kejelasan tujuan merupakan suatu teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan, jika kejelasan tujuan dapat digunakan secara tepat, dimonitor secara hati-hati dan

didukung secara aktif oleh atasan, maka kejelasan tujuan dapat meningkatkan hasil dan tujuan yang diinginkan.

Disamping itu kejelasan tujuan juga merupakan suatu teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan apabila kejelasan tujuan dapat digunakan secara tepat, dimonitor secara hati-hati dan didukung secara aktif oleh atasan. Maka kejelasan tujuan dapat meningkatkan hasil dan tujuan yang akan diinginkan.

Menurut Fatimah (2013) ada beberapa langkah dalam menetapkan suatu kejelasan tujuan :

1. Diagnosa kesiap-siagaan, maksudnya untuk menentukan apakah orang organisasi dan teknologi sudah cocok untuk menentukan tujuan.
2. Mempersiapkan karyawan dengan adanya interaksi, interpersonal, komunikasi, dan rencana bagi kejelasan tujuan.
3. Menekankan sifat-sifat dalam tujuan yang harus dimengerti atasan dan bawahan.
4. Melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengadakan penyesuaian yang perlu dalam tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan pemeriksaan akhir untuk mengecek tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Pelatihan

1. Pengertian Pelatihan

Pelatihan sebagai bahan pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik dari pada teori. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja masa depan (Sudiro, 2011).

Menurut pasal 1 ayat 9 undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa pelatihan merupakan keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Menurut Fatimah (2013) menyatakan bahwa Pelatihan adalah kegiatan dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu.

2. Tujuan Pelatihan

Menurut Fatimah (2013) Tujuan suatu pelatihan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjabatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan

diharapkan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan perusahaan.

Untuk mencapai program pelatihan, maka yang harus diperhatikan adalah :

- a) Mempunyai sasaran yang jelas dan memakai tolak ukur terhadap hasil yang dicapai
- b) Diberikan oleh tenaga pengajar yang mampu menyampaikan ilmunya serta mampu memotivasi peserta pelatihan
- c) Materi disampaikan secara mendalam sehingga mampu merubah sikap dan meningkatkan prestasi karyawan
- d) Menggunakan metode-metode yang tepat guna, misalnya diskusi untuk satu sasaran tertentu.
- e) Materi sesuai dengan latar belakang teknis, permasalahan, dan daya tangkap peserta.
- f) Meningkatkan keterlibatan aktif peserta sehingga mereka bukan sebagai pendengar saja
- g) Disertai dengan metode penilaian sejauh mana sasaran program pelatihan tercapai.

2.1.3.3 Dukungan Atasan

Menurut Heksarini (2014) menyatakan bahwa dukungan atasan dan manajemen diartikan sebagai sikap atasan untuk mengoptimalkan para peserta pelatihan menggunakan pengetahuan,

keterampilan dan perilaku yang diperoleh dalam pelatihan ke tempat kerja. Dukungan ini dapat dalam bentuk dorongan untuk menggunakan ketrampilan baru, asistensi dalam mengidentifikasi situasi dimana ketrampilan dapat diterapkan. Dukungan atasan meliputi penyusunan sasaran atau penilaian tujuan, mengevaluasi usulan dalam suatu proyek pengembangan sistem informasi, mendefinisikan informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, melakukan review program dan rencana pengembangan sistem informasi (Ningsih, 2014).

Lubis (2014) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak atau dukungan atasan merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Beberapa alasan keterlibatan manajemen puncak atau dukungan atasan dalam pengembangan sistem informasi. berikut merupakan hal yang penting

1. Pengembangan sistem merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan. Karena manajemen puncaklah yang paling mengetahui rencana perusahaan, maka mereka harus terlibat dalam pengembangan sistem yang baru sehingga sistem tersebut sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan demikian, mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
2. Manajemen puncak merupakan faktor utama dalam proyek pengembangan sistem.

3. Keterlibatan manajemen puncak menjamin bahwa tujuan perusahaan lebih ditekankan dari pada aspek teknisnya.
4. Manajemen puncak merupakan pihak yang paling dapat menginterpretasikan kemungkinan manfaat yang ingin diperoleh dari sistem yang akan dikembangkan, di mana hal ini merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan sistem yang akan dikembangkan.
5. Keterlibatan manajemen puncak akan memberikan manfaat dan menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan sistem.

Dukungan manajemen puncak sebenarnya harus ada pada semua tahap pengembangan sistem, yaitu dari tahap perencanaan strategis, tahap perencanaan sistem, sampai tahap implementasi.

Ciri-ciri atasan yang baik dapat memberikan dukungan kepada karyawannya dalam suatu organisasi (Kayati, 2016) adalah:

1. Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif untuk memberikan masukan yang baik kepada karyawannya,
2. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar,
3. Bekerja keras sehingga dapat memberikan contoh atau motivasi kepada karyawan,
4. Pandai bergaul dan dapat mengenal semua karyawan dengan baik,

5. Memberikan contoh bekerja dan semangat kepada bawahan atau karyawan, dan
6. Memiliki rasa integritas dan rasa bersatu padu dengan kelompok yang ada dalam organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari, N. R. (2017).	Pengaruh Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan dan Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif Sebagai Variabel Intervening.	Variabel dependen: Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik Kognitif dan Afektif sebagai variabel intervening Variabel independen: Kejelasan tujuan, dukungan atasan, pelatihan	<i>Purposive Sampling</i>	Kejelasan tujuan, dukungan atasan, dan pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Selanjutnya hanya pelatihan yang berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik afektif dan kognitif sebagai variabel intervening. Serta konflik afektif dan kognitif berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2.	Yulistia, Yanti, N., & Purwasih, I. (2017).	Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan di Badan Keuangan	Variabel dependen: Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah Variabel	<i>Sampling Jenuh</i>	Pelatihan dan kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan. dan hanya dukungan

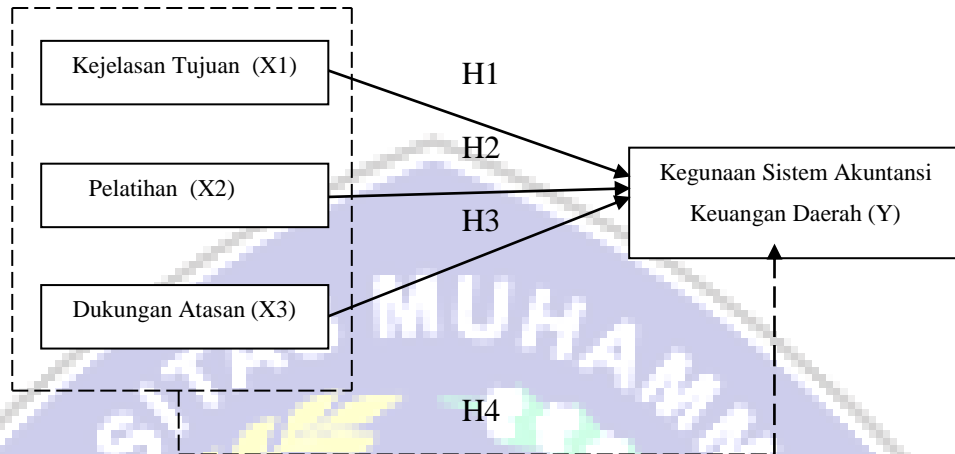
		Daerah Pemerintah	independen: Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan		atasan yang berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan. secara bersama-sama pelatihan,kejelasan tujuan, dan dukungan atasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan keuangan Daerah Pemerintah.
3.	Agustina, R., Soedjatmiko, & Zainab. (2019)	Pengaruh Dukungan Atasan, Pelatihan, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.		<i>Purposive Sampling</i>	Variabel dukungan atasan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada SKPD di pemerintahan kota Banjarmasin. Sedangkan variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD di pemerintahan kota Banjarmasin.
4.	Khaulia, A. T., Cahyono, D., & Pramono, D. E. (2019)	Pengaruh Faktor Kepribadian Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel dependen: kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel independen: pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan.	<i>Purposive Sampling</i>	Terdapat pengaruh pelatihan,kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Artinya semakin baik dari variabel tersebut mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan yang diberikan maka dapat memberikan peningkatan kegunaan sistem

					akuntansi keuangan daerah.
5.	Suwigyo, D. (2019).	Pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Variabel dependen: kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Variabel independen: pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan.	<i>Purposive Sampling</i>	Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta untuk Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem akuntansi sangat diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (<i>general purposes financial statements</i>) karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.



Sumber: Data diolah (2019)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori mengenai variabel-variabel yang sudah dijelaskan. Maka kerangka pemikiran dapat dikembangkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :  = garis parsial
 = garis simultan

Gambar diatas merupakan gambar dari kerangka pemikiran penelitian yang terdiri dari variabel independen kejelasan tujuan (X1), pelatihan (X2) dan dukungan atasan (X3) dan variabel dependen kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y).

2.4 Hipotesis

1. Pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Khaulia dkk (2019) menyatakan bahwa kejelasan tujuan adalah penting untuk diingat bahwa orang-orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Kejelasan tujuan dalam organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan

sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki..

Menurut Khaulia dkk (2019) menyatakan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Artinya, semakin baik kejelasan tujuan yang diberikan maka akan dapat memberikan peningkatan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Yulistia dkk (2017) menyatakan bahwa kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di badan keuangan daerah pemerintah.

H₀₁ : Kejelasan Tujuan tidak berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

H_{a1} : Kejelasan Tujuan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Pelatihan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Suwigyo (2019) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain dan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Dengan adanya pelatihan tentang

sistem akuntansi keuangan daerah maka dapat memberikan peningkatan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dkk (2019) menyatakan bahwa pelatihan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₀2: Pelatihan tidak berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

H_a2: Pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dapat dilakukan melalui dukungan atasan. Keterlibatan dukungan atasan dalam kesuksesan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Dukungan atasan memegang peranan penting dalam setiap siklus pengembangan sistem dan dengan adanya dukungan manajemen puncak berarti atasan terlibat secara langsung dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam menentukan efektivitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan jika tidak ada dukungan atasan maka sistem yang dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana perusahaan.

Suwigyo (2019) menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Artinya semakin tinggi tingkat dukungan atasan, maka implementasi sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin meningkat. Sedangkan Ruslinda dkk (2019) menyatakan bahwa dukungan atasan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

H₀₃ : Dukungan Atasan tidak berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

H_{a3} : Dukungan Atasan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa yang mempengaruhi diantaranya adalah pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan. Pelatihan perlu untuk diikuti oleh pengguna sistem akuntansi karena program pelatihan dapat meningkatkan pemahaman individu sehingga individu memahami manfaat yang diberikan atas penggunaan sistem akuntansi tersebut dan memudahkan individu dalam penggunaannya.

Kejelasan tujuan juga dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Dukungan atasan memegang peranan penting dalam siklus

pengembangan sistem dan dengan adanya dukungan atasan berarti atasan terlibat secara langsung dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam menentukan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

H₀₄ : Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan tidak berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

H_{a4} : Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

